



## Erosi Idealisme dan Komodifikasi Gerakan: Analisis Politisasi PC IPNU IPPNU Kabupaten Tegal

Zindan Baynal Hubi<sup>1)</sup>, Ibnu Sulaiman<sup>2)</sup>, Imam Solehudin<sup>3)</sup>, Agung Tesa Gumilar<sup>4)</sup>,  
Muhammad Reza Pahlevi<sup>4)</sup>

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia<sup>1)</sup>

Universitas Pancasakti, Tegal, Indonesia<sup>2)</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia<sup>3)</sup>

Universitas Ageng Tirtayasa<sup>4)</sup>

Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia<sup>5)</sup>

[zindanbaynal@unis.ac.id](mailto:zindanbaynal@unis.ac.id)<sup>1)</sup>

[sulaimanibnu867@gmail.com](mailto:sulaimanibnu867@gmail.com)<sup>2)</sup>

[imam.solehudin@uinsgd.ac.id](mailto:imam.solehudin@uinsgd.ac.id)<sup>3)</sup>

[agung.tesa@untirta.ac.id](mailto:agung.tesa@untirta.ac.id)<sup>4)</sup>

[mpahlevi68@gmail.com](mailto:mpahlevi68@gmail.com)<sup>5)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena erosi idealisme dan komodifikasi gerakan pada Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Tegal dalam momentum politik 2024. Masalah utama dalam kajian ini adalah terjadinya pergeseran orientasi organisasi dari wadah kaderisasi intelektual menjadi instrumen mobilisasi politik praktis. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar mekanisme komodifikasi modal sosial dan simbolik serta menganalisis dampak kooptasi politik terhadap integritas organisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, sumber penelitian melalui wawancara mendalam delapan belas informan, observasi dan dokumentasi. Teknik validasi menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan finansial mandiri, tekanan budaya loyalitas terhadap senior, dan motif oportunisme karier menjadi faktor pendorong utama pengurus dalam menggadaikan independensi organisasi. Praktik ini bermanifestasi dalam penggunaan forum resmi dan atribut organisasi sebagai alat kampanye elektoral. Kooptasi politik praktis telah menyebabkan degradasi fungsional dan intelektual yang mereduksi peran organisasi menjadi sekadar lumbung suara bagi elit politik.

**Kata kunci:** Komodifikasi, Politisasi, IPNU IPPNU, Kabupaten Tegal, Erosi Idealisme.

### Abstract

*This research examines the phenomenon of idealism erosion and movement commodification within the Tegal Regency Branch of the Nahdlatul Ulama Students' Association (IPNU) and the Nahdlatul Ulama Female Students' Association (IPPNU) during the 2024 political momentum. The central problem of this study is the shift in organizational orientation from a hub for intellectual cadre development into an instrument for practical political mobilization. This study aims to uncover the mechanisms of social and symbolic capital commodification and analyze the impact of political co-optation on organizational integrity. The method employed is descriptive qualitative with a case study design, utilizing data sources from in-depth interviews with eighteen informants, observation, and documentation. Data validation was ensured through triangulation. The results indicate that lack of financial independence, cultural pressure regarding loyalty to seniors, and career opportunism are the primary factors driving officials to compromise organizational*



*independence. This practice manifests in the use of official forums and organizational attributes as electoral campaign tools. Practical political co-optation has led to functional and intellectual degradation, reducing the organization's role to a mere vote bank for political elites.*

**Key words:** *Commodification, Politicization, IPNU IPPNU, Tegal Regency, Erosion of Idealism.*

## PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama Islam moderat melalui transformasi pendidikan pesantren yang inklusif dan berperan aktif sebagai penjaga stabilitas nasional. Strategi ini dilakukan dengan menyelaraskan tradisi intelektual klasik dengan realitas modern guna mencetak kader dakwah yang kompeten sekaligus toleran (Setiawan et al., 2026). Melalui manifestasi Islam Nusantara, NU mengintegrasikan ajaran agama dengan kearifan lokal serta prinsip *wasathiyah* untuk membangun narasi tandingan terhadap ideologi radikal yang didukung oleh penggunaan media digital guna memperkuat ketahanan sosial (Schmidt, 2021). Dalam tataran akar rumput, peran strategis ini diimplementasikan oleh badan otonom seperti IPNU dan IPPNU yang berfungsi sebagai jembatan otoritas antara kiai dan pelajar dalam menanamkan nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Meskipun berperan krusial sebagai garda terdepan dalam menangkai ekstremisme (Dhakiroh & As'ad, 2025), keberlanjutan basis kekuatan pelajar moderat ini tetap menghadapi tantangan kontemporer berupa risiko kooptasi politik praktis serta degradasi kualitas komitmen di level anggota maupun pengurus.

Menurut (Rambe et al., 2022), keterlibatan dalam politik praktis memaksa IPNU IPPNU Kabupaten Tegal melakukan adaptasi strategis yang mengedepankan pragmatisme demi kelangsungan organisasi, meskipun hal tersebut harus mengorbankan idealisme ideologisnya. Pergeseran ini menciptakan ambivalensi identitas yang kuat, di mana nilai moral dan dakwah yang seharusnya menjadi fondasi organisasi justru terdistorsi oleh kepentingan elektoral yang reaktif dan cair. Sejalan dengan pandangan (Musyarrofah & Zulhannan, 2023), intervensi politik tersebut memicu pendangkalan idealisme yang mengubah fungsi IPNU IPPNU Tegal dari wadah penguatan intelektual menjadi sekadar instrumen mobilisasi massa yang transaksional. Akibatnya, terjadi erosi integritas kolektif yang mendegradasi peran kader dari pemikir kritis menjadi penggerak massa yang pragmatis di bawah arahan patron politik lokal. Orientasi pelajar hijau di Tegal kini cenderung melakukan negosiasi identitas secara rasional, sehingga loyalitas terhadap doktrin organisasi tidak lagi menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan politik dibandingkan pertimbangan keuntungan praktis (Bandiyah, 2026).

Selain memicu erosi idealisme, kooptasi politik praktis pada IPNU dan IPPNU di Kabupaten Tegal memunculkan problematika serius berupa komodifikasi basis massa dan atribut organisasi. Menurut (Fardian, 2021), fenomena ini mewujud dalam pemanfaatan struktur sosial serta simbol keagamaan sebagai komoditas elektoral yang dikelola oleh broker politik demi keuntungan material maupun posisi strategis. Hal tersebut diperkuat oleh pemikiran (Ahmad, 2024) mengenai eksploitasi identitas organisasi di ruang digital sebagai instrumen komunikasi populis yang mempolarisasi massa demi pencitraan kandidat tertentu. Akibatnya, muncul normalisasi praktik transaksional yang mengubah basis massa menjadi sekadar objek dalam hubungan patron-klien. Pada akhirnya, IPNU dan IPPNU Tegal mengalami degradasi fungsional dari wadah kaderisasi moral menjadi instrumen mobilisasi suara yang tidak hanya merusak integritas organisasi, tetapi juga memperlemah kualitas demokrasi di tingkat lokal (Zulfiqar et al., 2025).

Penetrasi politik praktis di tubuh IPNU IPPNU Kabupaten Tegal telah memicu kemerosotan kualitas kaderisasi yang sistemik dengan mentransformasi fungsi organisasi menjadi jejaring makelar politik yang memprioritaskan loyalitas personal di atas penguatan ideologi (Hicken & Nathan, 2020). Fenomena ini, sebagaimana ditegaskan oleh (Aspinall & Hicken, 2020) mengakibatkan terjadinya pendangkalan pemikiran di kalangan pelajar NU di Tegal karena energi intelektual kader terserap sepenuhnya dalam aktivitas teknis-transaksional demi memenangkan kandidat tertentu, sehingga menghambat proses dialektika organisasi yang esensial. Akibatnya, struktur internal di tingkat cabang maupun anak cabang mengalami degradasi kualitas karena



suksesi kepemimpinan tidak lagi bertumpu pada kapasitas visi atau kompetensi strategis, melainkan pada kemahiran kader dalam mengelola hubungan klientelistik yang bersifat pragmatis. Kondisi tersebut diperparah dengan krisis integritas kronis akibat konflik kepentingan, yaitu tekanan dari patron politik lokal sering kali memaksa elemen organisasi terlibat dalam pemenangan elektoral demi jaminan karier atau eksistensi kelompok. Pada akhirnya, pola hubungan patron-klien ini merusak tatanan IPNU IPPNU Tegal secara sistemik karena standar moral serta profesionalisme kaderisasi dikorbankan demi melanggengkan kekuasaan melalui praktik transaksional yang koruptif (Kiemas et al., 2025).

Penelitian mengenai mobilisasi politik dalam organisasi keagamaan secara konsisten menunjukkan bahwa loyalitas spiritual sering kali dikonversi menjadi instrumen politik elektoral melalui mekanisme patronase. Studi ilmiah (Mukhlisin, 2021) menjelaskan bahwa organisasi seperti Nahdlatul Wathan memanfaatkan doktrin kepatuhan terhadap instruksi figur sentral untuk mengubah identitas keagamaan menjadi kekuatan suara yang solid melalui struktur organisasi. Studi (Fadillah et al., 2024) yang menyoroiti adanya instrumentalisasi otoritas keagamaan, di mana Kiai memanfaatkan kharisma sosialnya untuk mengubah kepatuhan spiritual jamaah menjadi dukungan politik nyata. Pergeseran peran elit agama ini tidak hanya berfungsi menjembatani nilai agama dengan kekuasaan, tetapi juga membawa risiko polarisasi di tingkat akar rumput akibat politisasi agama yang intens. Karakteristik mobilisasi berbasis otoritas moral ini dipertegas oleh studi (Yani et al., 2022) yang menyatakan bahwa pandangan politik Kiai diterima oleh jamaah sebagai panduan etis dan religius melalui jaringan pesantren yang kuat. Pola hubungan patron-klien ini ternyata tereskalasi hingga ke level organisasi otonom pelajar, studi (Khafifah, 2016) menunjukkan bahwa mobilisasi IPNU IPPNU bermanifestasi sebagai loyalitas sosiologis yang digerakkan oleh figuritas senior dan Kiai. Proses ini cenderung mengabaikan analisis programatik dan lebih mengutamakan identitas kolektif, sehingga kader muda terjebak dalam pola memilih tradisional yang patuh pada arahan patron politik.

Meskipun studi mengenai mobilisasi politik dalam lingkungan Nahdliyin telah banyak dilakukan, mayoritas literatur tersebut masih terbatas pada analisis peran sentral Kiai atau keterlibatan Nahdlatul Ulama secara struktural. Penelitian yang secara spesifik membedah fenomena politik praktis pada level badan otonom khususnya IPNU-IPPNU masih sangat sulit ditemukan dalam khazanah akademik saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengisi kekosongan tersebut melalui analisis dampak destruktif politik praktis bagi organisasi pelajar. Letak perbedaan (*research gap*) kajian ini dibandingkan dengan studi Khafifah (2016) terletak pada penekanan perspektif komodifikasi gerakan yakni memandang identitas dan atribut PC IPNU-IPPNU Kabupaten Tegal bukan sekadar manifestasi kepatuhan spiritual, melainkan sebagai aset yang dipertukarkan demi kepentingan elektoral pragmatis. Melalui pendekatan ini, penelitian tersebut memberikan kontribusi teoretis dalam membedah fenomena erosi idealisme serta degradasi intelektual pengurus akibat konflik kepentingan, yang selama ini luput dari analisis keberhasilan mobilisasi politik di kalangan organisasi pelajar.

Pemilihan Kabupaten Tegal sebagai lokus penelitian didasari oleh signifikansi sosiopolitiknya yang unik dalam lanskap Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah, mengingat wilayah ini merupakan basis pertahanan (*stronghold*) hijau yang sangat solid dengan catatan historis kemenangan entitas politik yang berafiliasi dengan NU dalam kontestasi legislatif maupun eksekutif secara konsisten sejak tahun 2013 hingga 2026. Dominasi ini ditopang oleh kuatnya massa partisipan yang mengakar dari tingkat ranting hingga cabang, termasuk PC IPNU IPPNU Kabupaten Tegal yang memiliki basis massa sangat besar di level sekolah, desa, hingga kecamatan. Namun, besarnya kuantitas kader tersebut justru memicu anomali fungsional yang membuat organisasi menjadi subjek kooptasi politik yang intens, di mana berdasarkan hasil wawancara dan observasi mendalam, ditemukan fenomena banyaknya alumni IPNU IPPNU yang bertransformasi menjadi aktivis partai politik yang beririsan dengan Nahdlatul Ulama. Keterlibatan alumni di ranah politik praktis ini menciptakan tekanan sosiokultural terhadap pengurus aktif untuk memberikan dukungan elektoral, sebuah praktik yang sering kali dibalut dalam prinsip lokal "*nulungi senior lan alumni*". Akibatnya, tekanan loyalitas senioritas ini cenderung mengalahkan



kepatuhan terhadap aturan formal organisasi, sehingga independensi dan marwah gerakan pelajar akhirnya dikomodifikasi secara sistemik demi kepentingan politik praktis.

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk membongkar mekanisme komodifikasi modal simbolik dan modal sosial dalam praktik politisasi di tubuh PC IPNU IPPNU Kabupaten Tegal, serta mengungkap faktor pendorong di balik erosi idealisme pengurus saat menghadapi tarikan kepentingan politik praktis. Lebih lanjut, studi ini bermaksud menganalisis dampak sistemik dari kooptasi politik terhadap degradasi integritas kaderisasi dan keberlanjutan prinsip independensi organisasi guna memetakan sejauh mana intervensi kepentingan elektoral mendistorsi fungsi utama lembaga sebagai wadah penguatan moral serta intelektual pelajar.

## METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui desain studi kasus untuk menginvestigasi dinamika kooptasi politik praktis yang terjadi pada PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Tegal secara mendalam, komprehensif, dan kontekstual. Proses penggalian data dilakukan secara ekstensif dengan durasi waktu selama sebelas bulan, terhitung sejak Januari hingga November 2024, melalui integrasi teknik observasi non-partisipan, analisis studi dokumentasi, serta wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 18 informan kunci yang telah ditentukan berdasarkan kriteria purposive sampling demi menjamin validitas temuan (Eisenhardt & Graebner, 2007).

Tabel 1. Data Primer Informan

Kode	Jumlah	Kriteria Informan
P1-P10	10 Orang	Ketua dan jajaran pengurus inti
P11-P14	4 Orang	Tokoh senior dalam jajaran partai politik yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.
P15-P18	4 Orang	Fungsionaris partai politik (khususnya PKB dan PPP)
<b>Total Informan</b>	<b>18 Orang</b>	<i>Purposive Sampling</i> untuk menjaga objektivitas dan triangulasi data.

sumber: Hasil Penelitian, 2026

Berdasarkan tabel 1 data informan tersebut, data primer penelitian ini dihimpun dari 18 informan kunci yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* untuk menjamin kedalaman dan triangulasi data. Komposisi informan meliputi 10 pengurus harian PC IPNU IPPNU Kabupaten Tegal sebagai representasi otoritas internal, 4 alumni yang aktif dalam partai politik berafiliasi Nahdlatul Ulama untuk membedah tekanan patronase senioritas, serta 4 fungsionaris partai politik dan pengamat politik lokal guna memvalidasi mekanisme mobilisasi massa. Proses analisis data dilakukan secara sistematis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (dalam Saputra et al., 2025) yang mencakup tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menerapkan analisis tematik manual untuk mengidentifikasi pola transformasi kesadaran kritis informan dengan teknik triangulasi sumber serta metode untuk menjamin keabsahan data. Pengumpulan data dihentikan setelah mencapai titik saturasi pada informan ke-16 hingga ke-18, di mana informasi yang diperoleh tidak lagi menunjukkan variasi kategori baru atau telah mencapai kejenuhan informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Komodifikasi Modal Simbolik dan Sosial Organisasi

PC IPNU IPPNU Kabupaten Tegal secara prinsipil senantiasa berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi yang menitikberatkan pada pengembangan kaderisasi, pengabdian sosial, penguatan nasionalisme, serta internalisasi nilai-nilai Islam Ahlussunnah Waljamaah. Keberhasilan dalam menyelenggarakan agenda kaderisasi

yang masif dan berjenjang mulai dari tingkat sekolah hingga kabupaten telah melahirkan basis massa yang sangat kuat, baik secara struktural maupun kultural. Namun, kepemilikan modal sosial dan simbolik yang signifikan tersebut justru memicu terjadinya pergeseran orientasi melalui jalinan komunikasi serta kontrak politik dengan sejumlah partai politik menjelang kontestasi Pemilu 2024. Kondisi ini menyebabkan terjadinya komodifikasi simbolik oleh oknum pengurus demi meraih keuntungan pribadi, seperti perluasan relasi kuasa dan insentif finansial yang pada akhirnya mencederai *khittah* organisasi sebagai pendamping masyarakat akar rumput. Praktik politik praktis ini terlihat nyata ketika struktur organisasi disalahgunakan untuk memobilisasi massa melalui pemanfaatan forum-forum resmi IPNU IPPNU sebagai panggung kampanye bagi para calon anggota legislatif.

Analisis data menunjukkan adanya diferensiasi tipologi komodifikasi yang signifikan antara kader IPNU dan IPPNU di Kabupaten Tegal, di mana keduanya terjebak dalam pusaran politik praktis demi insentif finansial dan perluasan relasi personal. IPNU cenderung mengadopsi pola transaksional-struktural yang agresif dengan mengeksploitasi forum resmi serta atribut organisasi sebagai instrumen mobilisasi fisik dan orasi politik demi karier pragmatis. Sebaliknya, IPPNU mengalami komodifikasi yang lebih subtil melalui manipulasi etika kepatuhan gender dan loyalitas personal terhadap patron senior, sehingga ruang kultural seperti pengajian terdomestikasi menjadi alat penggalangan dukungan berbasis sentimentalitas. Tekanan senioritas yang dibalut narasi "*kewajiban moral*" ini tidak hanya mengaburkan fokus kaderisasi intelektual kader putri, tetapi juga mencederai *khittah* organisasi sebagai pendamping masyarakat akar rumput. Fenomena ini mencapai puncaknya pada pemilihan legislatif ketika partai politik, seperti PKB dan PPP, mengooptasi pengurus untuk melakukan kerja teknis pendataan KTP di tingkat ranting yang secara nyata mereduksi marwah organisasi pelajar menjadi sekadar mesin politik bagi kepentingan elite.



Gambar 1. Dokumentasi *Road-show Rekan Z Tahun 2024*  
(Sumber: Instagram Rekan Z)

Berdasarkan sajian gambar 1. diferensiasi komodifikasi simbolik antara kader IPNU dan IPPNU di Kabupaten Tegal tereskalasi secara manifes melalui dukungan sistematis terhadap pasangan Ischak-Kholid dalam kontestasi pemilihan eksekutif. Pada kader IPNU, komodifikasi tersebut mewujud dalam penggunaan atribut resmi secara agresif sebagai instrumen legitimasi untuk mobilisasi massa dan orasi politik yang secara vulgar menyisipkan deklarasi dukungan ke dalam agenda formal seperti Orasi Keterpelajaran. Sebaliknya, simbolitas organisasi pada IPPNU mengalami domestikasi melalui eksploitasi etika kepatuhan gender dan relasi emosional sehingga kegiatan pengembangan bakat seperti *Road-show Rekan Z* serta jaringan kultural pengajian direduksi menjadi alat penggalangan dukungan berbasis sentimentalitas. Transformasi pengurus menjadi tim sukses inti ini tidak hanya memanfaatkan perangkat organisasi di berbagai tingkatan,

tetapi juga mengeksploitasi akun media sosial resmi PC IPNU IPPNU sebagai kanal kampanye terbuka. Fenomena tersebut secara simbolik menegaskan terjadinya pengambilalihan marwah organisasi pelajar oleh kepentingan politik elektoral praktis yang beraliansi dengan elite partai.

### Erosi Idealisme Menghadapi Tarikan Kepentingan Politik Praktis

Keterlibatan aktif PC IPNU IPPNU Kabupaten Tegal dalam pusaran politik praktis secara nyata telah memberikan dampak negatif terhadap citra organisasi serta mencederai marwah luhur yang dititipkan oleh para pendirinya. Sebagai organisasi pelajar dengan kuantitas anggota terbesar di wilayah Kabupaten Tegal, potensi massanya yang masif justru direduksi menjadi sekadar lumbung suara demi memelihara hubungan pragmatis dengan para calon pejabat, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Secara fundamental, fenomena ini berakar pada belum mapannya sistem manajemen keuangan internal yang menyebabkan organisasi gagal mencapai kemandirian finansial. Akibatnya, pilihan untuk menggadaikan integritas organisasi demi mendapatkan sokongan dana secara instan dianggap sebagai langkah darurat yang harus diambil guna menjamin keberlangsungan operasional dan berbagai agenda organisasi.

Tabel 2. Erosi Idealisme Menghadapi Politik Praktis

Faktor	Motivasi	Dampak
<b>Ekonomi</b>	Kebutuhan dana instan akibat keuangan tidak mandiri	Transaksional (Marwah tergadai)
<b>Budaya</b>	Loyalitas " <i>nulungi senior lan alumni</i> " dalam politik	Independensi kalah oleh senioritas
<b>Karier</b>	Organisasi sebagai batu loncatan politik praktis	Oportunisme (Jati diri pelajar pudar)

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Berdasarkan tabel 2, terdapat variabel sosiokultural yang memperumit posisi organisasi yakni banyaknya tokoh senior dan alumni yang turut berkontestasi dalam bursa pemilihan. Dalam konteks budaya masyarakat Tegal, terdapat nilai kearifan lokal berupa prinsip "*nulungi senior lan alumni*" yang dipandang sebagai kewajiban moral kolektif yang sulit untuk diabaikan. Tekanan budaya loyalitas ini sering kali jauh lebih kuat dibandingkan kepatuhan terhadap aturan formal organisasi, sehingga independensi organisasi akhirnya dikorbankan demi penghormatan terhadap pendahulu. Di sisi lain, keterlibatan para pengurus dan anggota dalam gelanggang politik ini juga didasari oleh motif oportunis untuk mengamankan "*golden ticket*" dalam meniti karier politik di masa depan. Menjadi bagian dari tim sukses atau pendukung utama dipandang sebagai jalur pintas strategis untuk bertransformasi menjadi aktivis partai atau pemangku kepentingan yang secara langsung akan memperlancar eksistensi serta karier pribadi mereka setelah purna tugas dari organisasi.

### Dampak Kooptasi Politik Terhadap Integritas Kaderisasi dan Prinsip Independensi

Kooptasi politik praktis dalam aktivitas PC IPNU IPPNU Kabupaten Tegal telah memicu berbagai dampak negatif yang sistemik, terutama terhadap keberlangsungan agenda internal organisasi. Fokus pengurus yang terdistorsi oleh kegiatan kampanye dan mobilisasi massa menyebabkan program strategis, seperti kaderisasi serta penguatan potensi kader, terpaksa dikorbankan demi agenda pengenalan calon pejabat. Kondisi ini diperparah oleh munculnya sikap oportunis di jajaran kepengurusan yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial dan ambisi karier politik masa depan. Akibatnya, jati diri organisasi yang seharusnya berakar pada masyarakat bawah kini bergeser menjadi instrumen kelas elite politik, sehingga mencederai marwah organisasi secara mendalam.

Pergeseran orientasi ini kemudian melahirkan stigma negatif di masyarakat yang memandang PC IPNU IPPNU Kabupaten Tegal sekadar sebagai "*gerbong*" atau lumbung suara



bagi partai politik tertentu, khususnya PKB dan PPP. Stigmatisasi tersebut berjalan beriringan dengan penurunan kualitas intelektual kader akibat organisasi yang lebih mengutamakan kegiatan seremonial transaksional dibandingkan pengembangan sumber daya manusia. Sangat ironis bahwa organisasi pelajar terbesar di Kabupaten Tegal dengan basis massa yang masif ini tidak lagi dioptimalkan sebagai ladang persemaian potensi, melainkan telah direduksi menjadi komoditas politik untuk kepentingan kekuasaan.

## Pembahasan

PC IPNU IPPNU Kabupaten Tegal secara prinsipil beroperasi dengan berpedoman pada AD/ART yang menitikberatkan pada kaderisasi, pengabdian sosial, penguatan nasionalisme, serta penanaman nilai Islam Ahlussunnah Waljamaah sebagai bentuk komitmen terhadap NKRI yang berlandaskan pilar ideologis, historis, dan keagamaan (Sugeng, 2026). Internalisasi nilai-nilai tersebut berhasil membangun basis massa yang solid dari tingkat desa hingga kabupaten melalui pemanfaatan modal sosial berupa jaringan hubungan, norma timbal balik, dan rasa saling percaya untuk mencapai tujuan kolektif. Menurut teori modal sosial karya (Putnam, 2000) menjelaskan bahwa kekuatan organisasi ini bertumpu pada mekanisme *bonding* untuk mempererat ikatan internal serta *bridging* guna membangun relasi eksternal, dimana keduanya menjadi pilar bagi kesehatan demokrasi dan stabilitas sosial. Dengan akar kepercayaan yang tinggi serta ikatan emosional mendalam antara kiai dan jemaah, IPNU IPPNU memiliki modal sosial kuat yang memungkinkan mobilisasi massa dilakukan secara cepat, masif, dan terstruktur (Uksan, 2025).

Keterlibatan IPNU dan IPPNU Kabupaten Tegal dalam pusaran kontrak politik menjelang Pemilu 2024 mencerminkan fenomena akumulasi dan konversi modal sosial serta simbolik demi meraih posisi sosial tertentu (Yusri et al., 2025). Di dalam arena sosial tersebut, para aktor cenderung saling menukarkan berbagai jenis modal yang mereka miliki demi mempertahankan dominasi kelompok (Richardson, 1987). Praktik ini kemudian mewujud dalam bentuk komodifikasi simbolik yang dilakukan oknum pengurus untuk mengejar insentif finansial dan memperluas jaringan relasi, sebuah tindakan yang mencederai kehormatan organisasi akibat penyalahgunaan forum resmi dan atribut lembaga sebagai mesin mobilisasi partai politik. Dinamika ini memperlihatkan perbedaan tipologi yang kontras, di mana kader IPNU cenderung menggunakan pendekatan transaksional-struktural yang agresif melalui eksploitasi atribut organisasi untuk mobilisasi fisik, sementara kader IPPNU terjebak dalam komodifikasi subtil yang memanipulasi kepatuhan gender serta loyalitas patronase guna mengubah ruang kultural menjadi sarana penggalangan dukungan. Tekanan senioritas yang dibungkus dengan narasi "*kewajiban moral*" tersebut pada akhirnya melumpuhkan kaderisasi intelektual dan mereduksi peran luhur organisasi pelajar menjadi sekadar operator teknis pendataan konstituen di tingkat akar rumput. Secara lebih luas, transformasi ini menunjukkan bagaimana interaksi sosial yang autentik dan kepercayaan komunitas dikonversi menjadi komoditas terukur serta aset ekonomi demi memenuhi kepentingan strategis pihak eksternal (Chen et al., 2024). Fenomena ini menjadi potret nyata bagaimana hubungan organik antarmanusia kini dikelola secara sistematis agar kekuatan jaringan sosial dapat diubah menjadi nilai fungsional yang menguntungkan entitas tertentu (Meek et al., 2019).

Penyimpangan ini semakin nyata pada kontestasi pemilihan eksekutif melalui dukungan sistematis terhadap pasangan Ischak-Kholid. Perangkat agenda organisasi IPNU IPPNU Kabupaten Tegal, seperti "*Orasi Keterpelajaran*" dan "*Road-show Rekan Z*", hingga media sosial resmi, ditransformasikan menjadi alat mobilisasi suara. Menurut (Riza et al., 2024) bahwa jaringan pesantren dan pelajar ini disintesis menjadi kekuatan "*branding*" politik karena memiliki legitimasi keagamaan yang kuat di mata pemilih. Keterlibatan aktif ini pada akhirnya mereduksi potensi massa IPNU IPPNU yang besar hanya menjadi sekadar "*lambung suara*" demi memelihara hubungan pragmatis dengan calon pejabat. Secara fundamental, ketergantungan ini berakar pada belum mapannya manajemen keuangan internal, sehingga organisasi menggadaikan integritasnya demi sokongan dana instan guna menjamin operasional. Fenomena ini relevan dengan Teori Pilihan Rasional Michael Hechter, di mana individu melakukan kalkulasi untung-rugi secara strategis berdasarkan insentif yang tersedia dalam struktur sosial (Hasnda & Alhuda, 2025). Selain



faktor finansial, terdapat variabel sosiokultural "*nulungi senior lan alumni*" yang mewajibkan loyalitas moral kepada pendahulu yang sedang berkontestasi. Tekanan budaya ini, ditambah motif oportunis untuk mengamankan "*golden ticket*" karier politik masa depan, sering kali mengalahkan kepatuhan terhadap aturan formal organisasi.

Kondisi ini menunjukkan terjadinya kooptasi politik, sebuah strategi elit untuk menyerap kelompok kritis ke dalam struktur kekuasaan agar tidak menjadi ancaman (Yuliana & Syarifuddin, 2019). Menurut (Nabela et al., 2024) menjelaskan bahwa kooptasi ini mengorbankan kemandirian organisasi karena kepentingan internal menjadi terikat pada patron politik demi akses sumber daya ekonomi. Pergeseran orientasi ini pada akhirnya melahirkan stigma negatif di masyarakat yang memandang IPNU IPPNU Kabupaten Tegal sekadar sebagai "*gerbong*" partai politik. Dampak sistemik yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan kualitas intelektual kader, karena organisasi lebih mengutamakan kegiatan seremonial transaksional dibandingkan pengembangan sumber daya manusia yang substansial.

## SIMPULAN DAN SARAN

PC IPNU IPPNU Kabupaten Tegal mengalami erosi idealisme akibat terjadinya komodifikasi dan konversi modal sosial-simbolik menjadi komoditas politik praktis dalam Pemilu 2024 yang dipicu oleh kalkulasi rasional pengurus atas keterbatasan finansial mandiri dan motif oportunis menjadikan organisasi sebagai batu loncatan karier politik melalui loyalitas kepada senior. Kooptasi oleh elit ini secara nyata mereduksi marwah organisasi dari pendamping akar rumput menjadi sekadar "*lambung suara*" yang pragmatis. Dalam memulihkan independensi organisasi, PC IPNU IPPNU Kabupaten Tegal disarankan perlu menempuh langkah taktis melalui penguatan kemandirian ekonomi dan integritas struktural. Langkah ini dapat dimulai dengan menginisiasi unit usaha mandiri, seperti pendirian koperasi pelajar yang mengelola atribut organisasi dan jasa kreatif secara terpusat guna memutus ketergantungan finansial pada aktor politik. Secara institusional, organisasi harus membentuk Badan Pengawas Etika yang berwenang memberikan sanksi atas penyalahgunaan atribut untuk kepentingan elektoral, sekaligus menyusun regulasi ketat yang membatasi intervensi alumni dalam kebijakan internal. Selain itu, revitalisasi kurikulum kaderisasi dengan penekanan pada literasi politik kritis dan etika kepemimpinan menjadi esensial untuk membentengi kader dari pragmatisme, sehingga orientasi gerakan kembali pada khittah pendidikan dan dakwah intelektual yang bermartabat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ini, seperti narasumber maupun segenap stakeholder lainnya. Artikel ini ditulis berdasarkan ketulusan dalam memperbaiki kondisi organisasi tanpa adanya kepentingan pihak manapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2024). Socially Mediated Populist Communication in Indonesia'S 2018 Gubernatorial Elections. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 20(2), 149–187. <https://doi.org/10.21315/ijaps2024.20.2.6>
- Aspinall, E., & Hicken, A. (2020). Guns for hire and enduring machines: clientelism beyond parties in Indonesia and the Philippines. *Democratization*, 27(1), 137–156. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1590816>
- Bandiyah. (2026). Preferensi Politik Pemilih Muslim di Bali; Perspektif Perilaku dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024. *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jim.v10i1.2026.305-315>
- Chen, J., Zhang, Y., Cai, H., Liu, L., Liao, M., & Fang, J. (2024). A Comprehensive Overview of Micro-Influencer Marketing: Decoding the Current Landscape, Impacts, and Trends. *Behavioral Sciences*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/bs14030243>



- Dhakiroh, E., & As`ad, A. (2025). Internalization of Religious Character Values through Discussion Activities Ngopi Bengi at IPNU-IPPNU Tahunan Branch. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 10(1), 194–210. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v10i1.6324>
- Dyah Nur Khafifah. (2016). PERILAKU MEMILIH DALAM PILKADA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (STUDI PADA ANGGOTA IPNU DAN IPPNU KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO). *Journal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v4n3.p%25p>
- Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. *Academy of Management Journal*, 50(1), 25–32. <https://doi.org/10.5465/AMJ.2007.24160888>
- Fardian, M. I. (2021). Buying Voters: Money and Political Transaction in Legislative Elections. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 1(1), 56. <https://doi.org/10.19184/csi.v1i1.21508>
- Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, M., Juliartha, E., Putra, R., & Putra Jaya, D. (2025). Penguatan Netralitas ASN Pada Pileg dan Pilkada Melalui Peran Bawaslu Kepala Daerah dan Inspektorat di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(10), 3873–3880. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i10.7061>
- Haliza Rizqica Fadillah, Juliansyah Aditya Rahadian, Moch. Faisal Rais, & Milana Sapta Dewi. (2024). Transformasi Peran Kiai dalam Politik Indonesia dari Otoritas Keagamaan ke Ranah Politik Praktis. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 151–163. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1047>
- Hasnda, N. A., & Alhuda, N. S. H. (2025). Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4586>
- Hicken, A., & Nathan, N. L. (2020). Clientelism's Red Herrings: Dead Ends and New Directions in the Study of Nonprogrammable Politics. *Annual Review of Political Science*, 23, 277–294. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-032657>
- Meek, S., Ogilvie, M., Lambert, C., & Ryan, M. M. (2019). Contextualising social capital in online brand communities. *Journal of Brand Management*, 26(4), 426–444. <https://doi.org/10.1057/s41262-018-00145-3>
- Mukhlisin, S. (2021). Mobilisasi Politik Kelompok Kepentingan Dalam Pilpres 2014 Di Desa Dasan Borok (Studi Nahdlatul Wathan). *Populika*, 9(2), 60–69. <https://doi.org/10.37631/populika.v9i2.385>
- Musyarrofah, U., & Zulhannan. (2023). Religious Moderation in the Discourse of Nahdlatul Ulama's Dakwah in the Era of Industry 4.0. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 409–434. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art5>
- Nabela, F., Shihabudin, R., Yadia, P. K., Dari, D. W., & Mahpudin, M. (2024). Jawara Dalam Pusaran Politik: Kooptasi Politik Organisasi Ttkkdh (Tjmande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir). *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 6(2), 73–93. <https://doi.org/10.51747/publicio.v6i2.2011>
- Putnam. (2000). Bowling Alone: America's Declining Social Capital: Originally published in Journal of Democracy. In *In Culture and Politics: A Reader*.
- Rambe, S., Suwaryo, U., Bainus, A., & . M. (2022). Antara Partai Dan Ormas: Studi Pergeseran Politik Syarikat Islam Periode 1971 - 2004. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 29–44. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5585>
- Richardson. (1987). Puzzles, Facts, and Tensions: Inquiry in the Sociology of Education. *Educational Researcher*, 16(6), 43. <https://doi.org/10.2307/1175546>
- Riza, R. M., Imronudin, I., & Fatchiatuzzahro, F. (2024). Analisis Habitus dan Kapital Khawārij Perspektif Pierre Bourdieu dalam Strategi Kekuasaan. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(2), 270–291. <https://doi.org/10.24090/maghza.v9i2.11317>
- Saputra, F., Elfemi, N., & Yuhelna, Y. (2025). Perkembangan Sosial Anak pada Keluarga Bercerai di Batuang Taba. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*,



- 9(4), 1954–1960. <https://doi.org/10.31604/jim.v9i4.2025.1954-1960>
- Schmidt, L. (2021). Aesthetics of authority: 'Islam Nusantara' and Islamic 'radicalism' in Indonesian film and social media. *Religion*, 51(2), 237–258. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2020.1868387>
- Setiawan, A. I., Abidin, Y. Z., Rustandi, R., Sarbini, A., & Aziz, R. (2026). Transforming Religious Education Through Inclusivity: How Indonesian Pesantren Cultivate Moderate Islamic Values and Da'wah Practices. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 70–92. <https://doi.org/10.31538/nzh.v9i1.406>
- Sugeng, R. (2026). Nahdlatul Ulama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia: Landasan Ideologis, Historis, dan Keagamaan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jim.v10i1.2026.95-104>
- Uksan, A. (2025). Strengthening Peace Education Through the Role of Nahdatul Ulama in Social Conflict in Jakarta in Realizing National Security. *International Journal of Religion*, 6(1), 278–288. <https://doi.org/10.61707/48x40023>
- Yani, M. T., Mahfud, C., Rangga Sa'adillah, S. A. P., Bustami, M. R., Maskuri, & Taufiq, A. (2022). Advancing the discourse of Muslim politics in Indonesia: A study on political orientation of Kiai as religious elites in Nahdlatul Ulama. *Heliyon*, 8(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12218>
- Yuliana, & Jurdi, Syarifuddin, F. (2019). Politik Kooptasi Karaeng Terhadap Hak Pilih Buruh Tani Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Bulukumba. *Vox Populi*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.24252/vp.v2i1.9349>
- Yusri, M. Y. Y., Kamaruddin, S. A., & Adam, A. (2025). Modal Sosial, Modal Budaya, dan Habitus Kesehatan: Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan di Masyarakat Perkotaan (Kajian Literatur Berbasis Teori Pierre Bourdieu). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 5012–5018. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3975>
- Zulfiqar, E., Pasaribu, S. E., Ritonga, S., Parapat, N., & Nasution, K. (2025). Pilkada Kota Padang Sidempuan 2024: Catatan dan Koreksi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 9(1), 338. <https://doi.org/10.31604/jim.v9i1.2025.338-346>